



REJANG LEBONG

SELASA, 7 FEBRUARI 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Dana Perjalanan Dinas Dewan Rp 10,2 Miliar

CURUP - Anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 mencapai angka yang cukup fantastis, Rp 10,2 miliar. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 lalu dimana perjalanan dinas menghabiskan Rp 11,4 miliar.

Besaran anggaran perjalanan dinas di tengah menurunnya kondisi keuangan daerah di Kabupaten Rejang Lebong saat ini mendapatkan sorotan banyak pihak. Apalagi APBD Rejang Lebong mengalami penurunan dari Rp 1,04 triliun pada saat pengesahan, menjadi Rp 800 miliar lantaran ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

Salah satu Aktivistis Muda Rejang Lebong, Ibrahim Rasyid mengatakan masyarakat Rejang Lebong perlu melihat pebuktian atas hasil yang didapat oleh para dewan

dari perjalanan dinas tersebut.

"Karena itu uang rakyat, jadi sangat wajar jika kami selaku masyarakat mempertanyakan apa saja dampak yang didapat daerah dari perjalanan dinas para wakil kami di parlemen tersebut. Karena jangan sampai perjalanan dinas yang telah dianggarkan itu tidak memberikan manfaat untuk pembangunan daerah ini," terang aktivis HMI Rejang Lebong tersebut.

Ibrahim juga berharap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu bisa menyoroti dan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang tiap tahunnya mencapai angka belasan miliar, sementara sampai saat ini pembangunan daerah juga terlihat masih

jalan di tempat.

"Angka di atas Rp 10 miliar itu bukanlah sedikit. Coba kalau dialihkan untuk pembangunan, sudah berapa jalan di Rejang Lebong bisa diperbaiki dan dibangun? Sudah berapa drainase bisa dibangun? Itu jelas bisa dirasakan masyarakat hasilnya. Sementara untuk perjalanan dinas, kita bisa survey ke masyarakat Rejang Lebong, apa yang mereka rasakan hasil dari perjalanan dinas itu?," jelas Ibrahim.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Provinsi Bengkulu, Sony Taurus, S.Kom. Ia mengatakan harusnya perjalanan dinas berbanding lurus dengan kinerja DPRD Rejang Lebong. Ia menantang DPRD Rejang Lebong untuk membuka apa saja hasil dari perjalanan dinas yang dilakukan DPRD Rejang

Lebong kepada seluruh masyarakat Rejang Lebong, sehingga masyarakat bisa mengetahui langsung apa saja kinerja yang telah dilakukan oleh wakil rakyatnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Mahdi Husein, SH menjelaskan anggaran perjalanan dinas tersebut disusun melalui tahapan dan analisa yang cukup matang berdasarkan kebutuhan lembaga dan daerah. Ia melihat porsi anggaran perjalanan dinas tersebut masih wajar dengan banyaknya tugas dan fungsi dewan.

"Anggaran perjalanan dinas DPRD itu sudah menjadi anggaran tahunan dan disusun melalui berbagai analisa dan kajian atas kebutuhan lembaga. Jika berbicara soal kinerja, ya saya pikir jika kita bandingkan dengan APBD kita

yang mencapai kurang lebih hampir 800 miliar, jumlah tersebut belum ada apa-apanya. Malahan tahun ini kita mengalami penurunan yang sangat signifikan," jelasnya.

Mahdi mengatakan jumlah anggaran perjalanan dinas tersebut termasuk angka yang wajar, karena banyak kegiatan DPRD Rejang Lebong yang harus dilaksanakan. Namun jika dikaitkan dengan implementasi, feedback dan lainnya itu mungkin bergantung pada penilaian masyarakat.

"Tapi pada prinsipnya apa yang sudah dilakukan dalam penyusunan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi yang harus dilakukan DPRD Rejang Lebong. Prinsipnya kita tidak akan melebihi target kemampuan daerah," tutur Mahdi. (sly)